DAFTAR PENANGANAN SENGKETA KONSUMEN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11 Januari 2024	Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : B/18/I/RES.2.1./2024/ Ditreskrimsus, Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Pertanyaan Terkait Minyak dan Gas Bumi	Penyidik Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang menangani dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Peetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.50 WIB atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari 2024 di depan Toko Feby Jalan Kenanga Kel. Kalampangan Kec. Sebangau Kota Palangka Raya	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP melalui Surat Perintah Tugas No. 800/013.1/SET/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Perlindungan Konsumen dan Perdagangan pada hari Jumat, 12 Januari 2024 pukul 08.00 WIB di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimus Polda Kalteng.
2	12 Januari 2024	Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor B/156/I/RES.5./2024/Satreskrim, Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Pertanyaan Terkait Perlindungan Konsumen	Satreskrim Polres Kotawaringin Barat sedang melaksanakan Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 204 KUHP atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf "g", huruf "i" dan huruf "j" Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang berada di JI. Pakunegara Gg. Ketapi RT. 17 Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng, yang dilakukan oleh Muhammad Effendi bin Agustinus	Kepala Disdagperin Provinsi Kalteng melalui Surat Perintah Tugas No. 800/022.1/SET/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memenuhi panggilan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Perlindungan Konsumen pada hari Senin, 25 Januari 2024 di Satreskrim Polres Kotawaringin Barat, P. Bun.

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	15 Januari 2024	Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor B/158/I/RES.5./2024/Satreskrim, Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Pertanyaan Terkait Perlindungan Konsumen	Satreskrim Polres Kotawaringin Barat sedang melaksanakan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 KUHP atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf "g", huruf "i" dan huruf "j" UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Pasal 142 UURI No. 18 Tahun 2012 Tetang Pangan yang terjadi di Jalan Kalimantan RT01 Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB yang dilakukan oleh Basri bin Hadran	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Perintah Tugas No. 800/023.1/SET/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memenuhi panggilan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Perlindungan Konsumen pada hari Senin, 29 Januari 2024 di Satreskrim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun.
4	18 Januari 2024	Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: B/24/I/RES.2.1./2024/ Ditreskrimsus, Perihal: Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Pertanyaan Terkait Perlindungan Konsumen	Penyidik Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promisi penjualan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di wilayah hukum Polda Kalteng	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP melalui Surat Perintah Tugas No. 800/020/SET/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Perlindungan Konsumen dan Perdagangan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimus Polda Kalteng.

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	18 Januari 2024	Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: B/26/I/RES.2.1./2024/ Ditreskrimsus Perihal: Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Pertanyaan Terkait Perlindungan Konsumen	Penyidik Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terjadi pada hari Kamis, 18 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari 2024 di CV. Karya Mandiri Candi Jalan DPR RT.004 RW.000 Desa Sei Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP melalui Surat Perintah Tugas No. 800/020/SET/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Perlindungan Konsumen dan Perdagangan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 22.30 WIB di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimus Polda Kalteng.
6	23 Januari 2024	Surat Kepala Kepolisian Resor Sukamara Nomor : B/41/I/RES.2.1./2024/Res Sukma, Perihal : Bantuan Permintaan Keterangan Ahli B/44/I/RES.2.1./2024/Res Sukma, Perihal : Bantuan Permintaan Keterangan Ahli B/47/I/RES.2.1./2024/Res Sukma, Perihal : Bantuan Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Pertanyaan Terkait Minyak dan Gas Bumi	Penyidik Satreskrim Polres Sukamara sedang menangani perkara dugaan Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang terjadi di jalan Poros Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polres Sukamara, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari 2024	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP melalui Surat Perintah Tugas No. 800/027/SET/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan pada hari Senin, 29 Januari 2024 di Unit Idik III/Tipidter Satreskrim Polres Sukamara

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
7	02 Februari 2024	Surat Kepala Kepolisian Resor Kapuas Nomor : B/189/II/RES.1.24/2024/Reskrim Perihal : permohonan permintaan keterangan ahli	-	-	Pertanyaan Terkait Perlindungan Konsumen	Penyidik Satreskrim Polres Kapuas sedang menangani perkara dugaan tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/dan atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/dan atau jasa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat 1 huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat 1 huruf f juncto Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang terjadi di Jalan Pemuda Km.4 (dekat bundaran besar) Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan kepada Penyidik Satreskrim Polres Kapuas
	16 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui nomor kontak PK. 7 orang pengadu dari wilayah Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Katingan	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	17 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui nomor kontak PK dari Kabupaten Kapuas	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kapuas	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	18 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui nomor kontak PK. 3 orang pengadu dari Kabupaten Kotim dan Palangka Raya	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kotim dan Palangka Raya	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	21 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui nomor kontak PK. 2 orang pengadu dari Kabupaten Gumas dan Katingan	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Gumas dan Katingan	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	23 April 2024	Surat Ditreskrimsus Polda Kalteng No : B/1300/IV/RES.2.1./2024/Ditres krimsus		-	Permintaan Keterangan terkait perdagangan	Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada paragraf 5 Energi dan dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan April 2024 di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14 Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	24 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui nomor kontak PK. 1 orang pengadu dari Kabupaten Kapuas	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kapuas	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	24 April 2024	Surat Ditreskrimsus Polda Kalteng No : B/1298/IV/RES.2.1./2024/Ditres krimsus	-	-	Permintaan Keterangan terkait minyak dan gas bumi	Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tidndak pidana di bidang minyak dan gas bumi terkait penyalahgunaan pengangkutandan/atau niaga bahan balar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yang terjadi pada hari Selasa 23 April 2024 di Jl. Jenderal Sudirman Km. 09 Kel. Pasir Putoh Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Kamis 25 April 2024
	24 April 2024	Surat Ditreskrimsus Polda Kalteng No : B/1306/IV/RES.2.1./2024/Ditres krimsus Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Permintaan Keterangan tentang pendistribusi an bapokting	Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 fahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan April 2024 di Jalan Cilik Riwut Km. '1,5 No. 1 RT. 011 RW. 003 Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawanngin Timur Prov. Kalteng atau setidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan kepada Ditreskrimus Polda Kalteng

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	25 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui nomor kontak PK. 1 orang pengadu dari Kabupaten Pulang Pisau	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Pulang Pisau	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	26 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui kontak PK. 1 orang pengadu dari Kab. Kapuas	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kapuas	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	27 April 2024	-	Pengaduan anonim melalui kontak PK. 3 orang pengadu dari Kab. Kapuas dan Gunung Mas	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kapuas dan Gunung Mas	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	30 April 2024	Surat Ditreskrimsus Polda Kalteng No : B/1343/IV/RES.2.1./2024/Ditres krimsus Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-		Permintaan Keterangan Terkait Perlindungan Konsumen	Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan i UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli di 12bidang perdagangan dan perindustrian kepada Ditreskrimus Polda Kalteng pada hari Jumat 3 Mei 2024
	7 Mei 2024	Surat Ditreskrimsus Polda Kalteng No : B/1443/V/RES.2.1./2024/Ditresk rimsus Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Permintaan Keterangan Terkait Perdagangan	Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan dan di bidang minyak dan gas bumi di Jl. Tamiyang Layang-Ampah Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa, 27 Februari 2024.	Kepala Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan kepada Ditreskrimus Polda Kalteng

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	14 Mei 2024	B/1519/V/RES.2.1./2024/Ditresk rimsus Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Permintaan Keterangan Terkait Perdagangan	Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan dan di bidang minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari Senin 13 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya dalam kurun waktu bulan Mei 2024 di Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Kel. Kalampangan Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan kepada Ditreskrimus Polda Kalteng pada hari Kamis 16 Mei 2024.
	17 Mei 2024	Surat Kejaksaan Negeri Sukamara No. SP- 366/O.2.20/Eku.2/05/2024 Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Permintaan Keterangan Terkait Perdagangan	Permintaan Keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Rian Hidayat bin Wahyudiono.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan kepada Kejaksaan Negeri Sukamara.
	11 Juni 2024	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah No. B/1760/RES.2.1./2024/Ditreskri msus Perihal : Permintaan Keterangan Ahli	-	-	Permintaan Keterangan Terkait Perdagangan	Penyidik Subdit I/ Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya dalam kurun waktu bulan Mei 2024 di Ruko M. Raffa di Jl. Mendawai Induk No. 49 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan pada hari Kamis, 13 Juni 2024 di Polda Kalteng.

No.	Tanggal Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Nomor Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Nama dan Alamat Konsumen	Nama dan Alamat Pelaku Usaha	Jenis Pengaduan/ Pertanyaan/ Informasi	Deskripsi Permasalahan	Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	19 Juni 2024	Surat Kejaksaan Negeri Palangka Raya No. B- 101/O.2.10/Eku.2/06/2024 Perihal : Surat Panggilan Ahli	-	-	Permintaan Keterangan Terkait Perdagangan	Permintan Keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Yetty Diana Binti Bardiansyah.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan PPNS-PK a.n. Kristy Briantony, S.STP untuk memberikan keterangan sebagai ahli perdagangan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, hari Senin, 24-7-2024.
	1 Juli 2024	-	Nirwan Gultom. Jl. Ratu Dibalau, Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Kota Palu	Hotel M. Bahalap Palangka Raya, Jl. RTA Milono Km. 1,3, Menteng, Jekan Raya.	Konsultasi Terkait Jasa	Permintaan Refund Pengadu kepada manajemen Hotel M Bahalap ditolak dengan alasan bahwa Pengadu terlambat untuk melakukan cancel atau reschedule. Dimana Pengadu melakukan pemesanan dan pembayaran pada tanggal 26 Juni 2024 untuk reservasi hotel pada tanggal 27-28 Juni 2024. Pengadu melakukan cancel pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.	Pengaduan telah diselesaikan setelah melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen hotel M Bahalap.
	22 Juli 2024	-	Friskine. Jl. Bukit Indah No. 10B Palangka Raya	Astra Credit Companies (ACC) Palangka Raya. Jl. Cilik Riwut Km. 6 Palangka Raya	Konsultasi Terkait Leasing	Pengadu tidak dapat mengambil BPKB Mobil jenis Daihatsu Xenia 1.3 dengan nomor seri KH1200AB dari perusahaan Finance ACC Palangka Raya walaupun angsuran sudah dibayar lunas. Pihak Finance menolak dengan alasan Pengadu belum melunasi denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 23.114.500	Pengaduan masih dalam proses.
	26 Juli 2024	-	Pengaduan anonim melalui kontak PK. 1 orang pengadu dari Kab. Kapuas	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kapuas	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen
	31 Juli 2024	-	Pengaduan anonim melalui kontak PK. 1 orang pengadu dari Kab. Kobar	Pangkalan LPG yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat	Pengaduan terkait Pendistribusi an LPG 3 kg	Pengaduan tentang Pangkalan yang menjual LPG 3 kg melebihi HET dengan harga tinggi dan keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kekosongan stok LPG 3 kg di daerah.	Ditindaklanjuti melalui pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di wilayah kabupaten/kota oleh Bidang Perlindungan Konsumen